

---

## BAB V

# BAGAIMANA PAJAK BERPERAN SEBAGAI PERWUJUDAN SILA-SILA PANCASILA?

---

Pada bab ini, Anda akan diminta untuk memahami arti penting kewajiban pajak sebagai perwujudan pengamalan sila-sila Pancasila. Sebagai panduan, bab ini akan memaparkan secara singkat tentang krisis kepercayaan yang dialami oleh bangsa Indonesia yang dampaknya tidak hanya pada bidang politik, tetapi juga pada bidang ekonomi terutama menurunnya kesadaran warga negara yang mampu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Krisis kepercayaan terlihat pada pencarian kepuasan langsung dengan menyingkirkan norma kolektif sehingga tidak ada lagi nilai kebersamaan yang menjadi standar hidup bersama. Hal ini mulai terlihat dalam berbagai fenomena kehidupan di Indonesia yang lebih mengagungkan pencarian kepuasan dalam bentuk materi, sehingga tidak lagi menghargai norma kolektif bangsa.

Salah satu bentuk sikap yang tidak lagi menghargai norma kolektif bangsa adalah keengganan sebagian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan kecerdasan ideologis sebagai seorang warga negara. Kecerdasan ideologis (*ideological intelligence*) mengacu pada kapasitas seorang warga negara untuk hidup berdampingan dengan warga negara lainnya dalam suasana damai dan toleran. Suatu bangsa merupakan ikatan emosional yang memerlukan semangat kebersamaan (*mitsein*), sedangkan negara merupakan institusi yang memiliki aturan bersama sehingga memerlukan semangat kepatuhan untuk hidup bersama. Oleh karena itu, terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk mendukung kecerdasan ideologis dalam kehidupan bangsa Indonesia.

*Pertama*, pemahaman atas hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Seseorang yang memahami hak dan kewajibannya dengan baik, berarti ia telah menempatkan diri secara tepat dan proporsional dalam kedudukannya sebagai warga negara. Hak adalah sesuatu yang boleh dimiliki dan diperjuangkan dalam kedudukannya sebagai warga negara. Misalnya, hak untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum merupakan hakikat keadilan atau ingin diperlakukan adil dari setiap orang. Kewajiban merupakan sisi lain dari keadilan di samping hak, karena hak bagi satu pihak menuntut kewajiban dari pihak lain.

*Kedua*, pemahaman atas semangat toleransi sebagai wujud hidup bersama. Toleransi merupakan suatu pemahaman atas situasi dan keadaan yang berkembang dalam kehidupan bersama. Seseorang dikatakan toleran apabila ia dapat memahami situasi dan keadaan orang lain, sehingga tidak terjadi konflik. Toleransi merupakan sikap mental yang menghargai perbedaan, serta memiliki kontrol atau pengendalian diri dalam ruang publik. Toleransi membuka peluang untuk terjadinya komunikasi dan dialog di antara berbagai pihak sehingga situasi yang semula beku menjadi cair.

*Ketiga*, pemahaman atas nilai keberagaman sebagai suatu faktisitas. Keberagaman atau pluralitas merupakan fitrah manusia, karena tidak ada orang benar-benar sama dalam segala hal. Perbedaan tidak hanya merupakan faktisitas, melainkan sebagai ujian untuk membuktikan kematangan (*maturation*) seseorang atau suatu komunitas dalam pergaulan antarsesama.

*Keempat*, pemahaman atas nilai luhur sebagai warisan sejarah dalam bentuk norma kolektif. Sikap menghargai warisan sejarah masa lampau diperlukan untuk mengolah dan menanamkan memori kolektif dari suatu bangsa. Warisan masa lampau akan bermanfaat apabila diimplementasikan dalam kondisi saat ini. Interpretasi atas nilai luhur sebagai warisan sejarah masa lampau diperlukan untuk membangun rasa kebersamaan. Warisan masa lampau merupakan goresan yang membekas dalam memori banyak orang untuk memahami *raison d'être* bangsa atau kelompok tersebut. Pemahaman atas kehadiran suatu bangsa yang mampu membangkitkan rasa

kebangsaan (nasionalisme), pada gilirannya melahirkan rasa cinta tanah air, tidak hanya dalam arti fisik dan formal, bahkan tanah air dalam arti mental.

*Kelima*, pemahaman atas nilai ideal yang diperjuangkan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nilai ideal diperlukan sebagai *guidance* dan *leading principle* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ideal sebagai *guidance* memiliki arti bahwa nilai tersebut dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan bersama suatu bangsa. Nilai ideal sebagai *leading principle* memiliki arti bahwa nilai tersebut berisikan prinsip-prinsip hukum yang bersifat tersirat, sehingga tidak dapat dilihat, namun bisa dirasakan keberadaannya.

Bab ini menggambarkan Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan penuntun penyelenggara negara dan warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Salah satu pendukung pokok terwujudnya kesejahteraan bangsa adalah pajak.



### **AKTIVITAS**

*Silakan Anda mencari sumber pembeding hubungan ideologi dengan pajak di Negara lain.*

## **5.1. Menelusuri Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

Anda sebagai mahasiswa tentu sudah mengetahui bahwa Pancasila adalah Ideologi Negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung sistem nilai yang khas pada setiap silanya karena setiap ideologi mengandung cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama. Berikut ini akan dikemukakan secara singkat tentang hakikat sila-sila Pancasila sebagai Ideologi tersebut.

### **5.1.1. Hakikat dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, dengan penambahan awalan ke- dan akhiran -an. Ketuhanan mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya. Keyakinan itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan

kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bertitik tolak dari kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam ruang sejarah bangsa Indonesia, sehingga dalam alinea III Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai "Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Tidak setiap bangsa mencantumkan kehadiran Tuhan dalam sejarah kelahiran bangsanya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, nilai Ketuhanan mendapat perhatian yang besar dari pendiri negara.

Soekarno, dalam pidato 1 Juni 1945, melontarkan gagasan tentang ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain (Yudi Latif, 2011: 55). Komponen kecerdasan ideologis dalam sila pertama ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, menghadirkan Tuhan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, kehadiran Tuhan dibuktikan melalui budi pekerti yang luhur. *Ketiga*, saling menghormati (toleransi) antar umat beragama.

Atas keyakinan tersebut, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Indonesia tidak memperbolehkan terdapat sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan yang Maha Esa, anti keagamaan, serta tidak boleh terdapat paksaan dalam memeluk agama dan beribadah. Dengan kata lain, Negara Indonesia meniadakan atheisme (tidak memiliki Tuhan).

### **5.1.2. Hakikat dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

*Kemanusiaan* berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi inilah yang membuat manusia menduduki martabat yang tinggi dengan akal budinya dan menjadi berkebudayaan dengan budi nuraninya. *Adil* mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. *Beradab* berasal dari kata adab, yang

berarti budaya, serta mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesucilaan. Adab mengandung pengertian tata kesopanan kesucilaan atau moral.

*Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.*

Di dalam sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab. Sila kedua ini diliputi dan dijiwai oleh sila pertama hal ini berarti bahwa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaan-Nya.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berangkat dari kesadaran historis bangsa Indonesia "... penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Bung Hatta sebagai salah seorang pendiri negara menegaskan bahwa pengakuan kepada dasar Ketuhanan yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di alam dengan memupuk persahabatan, persaudaraan antar manusia dan bangsa (Yudi Latif, 2011: 125-127).

### **5.1.3. Hakikat dari Sila Persatuan Indonesia**

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpecah belah. Persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Jadi, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah Negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Sila Persatuan Indonesia bertitik tolak dari kesadaran bahwa diperlukan kemampuan untuk mengelola keanekaragaman menjadi suatu kekuatan

persatuan (*unity*). Persatuan Indonesia merupakan *starting point* kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia untuk menggalang semangat kebersamaan (*Mitsein*). Kebersamaan merupakan modal penting untuk melawan berbagai bentuk penjajahan. Gellner menegaskan: “*Nationalism is primarily a political principle, which holds that the political and the national unit should be congruent* (Poole,1999:10).

Penyelarasan antara prinsip politik dengan prinsip berbangsa ini memerlukan moralitas politik untuk menjaga *vested interest* yang berlebihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komponen kecerdasan ideologis yang penting dalam sila ketiga ini ialah mengutamakan kepentingan bangsa dan memiliki semangat pengorbanan yang terbina dari dalam diri setiap warga negara.

Di samping itu, nasionalisme, sebagai sebuah ikatan kebersamaan, mengajarkan pentingnya memahami konsensus, terutama dalam memahami simbol-simbol negara, termasuk semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan yang terdapat pada simbol burung Garuda itu merupakan sebuah komitmen untuk hidup bersama dalam keberagaman yang ada. Oleh karena itu, kecerdasan simbolis diperlukan untuk menyertai komponen ideologis dalam sila ketiga ini.

Dewasa ini, komponen kecerdasan ideologis ini yang mengalami nuansa dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, karena ketidakmampuan menyelaraskan antara kepentingan politik -khususnya partai politik- dengan kepentingan bangsa dalam lingkup yang lebih luas, sehingga di kalangan masyarakat berkembang semacam politikofobia, fobia terhadap politisi.

#### **5.1.4. Hakikat Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan dengan sila keempat bahwa “kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mupakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedura) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan bertitik tolak dari kesadaran bahwa kebijaksanaan adalah sikap jiwa filosofis yang mempertemukan pendirian pribadi dengan orang lain dalam sebuah ruang publik, yakni wadah yang di dalamnya keyakinan dan pendapat dapat ditampung dan dibicarakan secara bebas dan bertanggung jawab. Semangat musyawarah --- *Syirtu al-'asal* yang artinya mengeluarkan madu dari wadahnya -- Dalam sila keempat ini mengarah pada suasana dialogis dalam suatu komunikasi atau pengambilan keputusan, sehingga pendirian pribadi mencair dengan keputusan yang diambil bersama. Komponen kecerdasan ideologis dalam sila keempat ini terletak pada kemampuan untuk berkomunikasi dengan semangat musyawarah.

### **5.1.5. Hakikat sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

*Keadilan sosial* berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. *Seluruh rakyat Indonesia* berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Jadi, sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, serta merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya dilaksanakan dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bertitik tolak dari kesadaran bahwa adil merupakan cita-cita yang didambakan setiap insan

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk keseimbangan antara apa yang seharusnya (*Das Sollen*) dengan apa yang sebenarnya (*Das Sein*). Komponen kecerdasan ideologis dalam sila keadilan terletak pada dua hal, yaitu kemampuan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri, dan kemampuan menemukan aspek keseimbangan antara nilai ideal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan nilai kenyataan dalam tindakan atau keputusan yang diambil.

Keadilan dalam sila kelima harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan manusia lainnya, manusia dengan Tuhan-nya, dan manusia dengan dirinya sendiri.

Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini terjelma dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya.

## 5.2. Menanya Kaitan Sumber Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Politis tentang Pajak Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila



### **AKTIVITAS**

*Mahasiswa diminta untuk mengajukan pertanyaan tentang kaitan historis, sosiologis, yuridis, dan politis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.*

Berdasarkan penelusuran kepustakaan tidak ditemukan naskah yang secara eksplisit mengemukakan sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, jika dikaji secara umum, pajak merupakan salah satu hal penting dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini akan dipaparkan tentang



sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai Ideologi negara.

### 5.2.1 Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia.

1. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan presiden Soekarno.

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945-1960. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada rentang waktu 1960--1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka Soekarno lebih memiliki pandangan kegotongroyongan dalam membangun bangsa.

2. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR Nomor II/1978 tentang pasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (monotafsir ideologi) yang berkuasa pada waktu itu.

3. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan presiden Habibie  
Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang

bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres Nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.

4. Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid.

Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.

5. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati.

Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

6. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Pada awal pemerintahannya, Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik dengan meraih

suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).

Presiden Ketiga B. J. Habibie dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011, mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah “sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai *ground norm* (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural.”(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/01/lm43df-ini-dia-pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>)

### 5.2.2 Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
3. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk

menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.



#### **AKTIVITAS**

*Anda dipersilakan menggali informasi untuk memperkaya pengetahuan tentang sumber sosiologis (kearifan lokal) dalam hal kehidupan beragama, menghormati hak-hak orang lain, bentuk solidaritas, dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.*

### **5.2.3 Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara**

Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama;
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia;
- c. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai;
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada *voting*.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) untuk

memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.

### **5.3 Menggali Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pembentukan Pribadi Yang Bermartabat**

Manusia dalam hidupnya selain sebagai makhluk individu mandiri juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Lebih dari itu, manusia juga adalah makhluk Tuhan, yang memberikan kehidupan dan rezeki kepadanya. Manusia hanya dapat menjadi bermartabat dalam hidupnya manakala ia mampu mengharmoniskan hubungannya dengan sesama manusia dan tentu juga dengan Tuhan. Berikut ini akan dikemukakan secara singkat penggalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan pribadi yang bermartabat.

#### **5.3.1 Nilai-nilai dalam Sila Ketuhanan yang Maha Esa**

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut.

1. Nilai Syukur  
Syukur adalah rasa terima kasih atas segala kenikmatan yang diterima dari Sang Maha Pemberi Rezeki. Rasa bersyukur diwujudkan dalam beberapa aspek:
  - a. secara lisan dalam bentuk ucapan yang lahir dari kesadaran untuk berterima kasih atas segala nikmat yang diperoleh;
  - b. secara tindakan dalam bentuk menyalurkan kelebihan rezeki yang diperolehnya kepada pihak yang membutuhkan. Contohnya warga negara yang mampu memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu melalui pembayaran pajak.
  
2. Nilai Toleransi  
Toleransi adalah semangat untuk saling memahami perbedaan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Toleransi dalam

konteks kehidupan beragama adalah semangat untuk memahami perbedaan keyakinan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, sehingga menghindari terjadinya konflik antar umat beragama. Toleransi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah semangat untuk saling berbagi antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Dalam hal ini, negara berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani kesenjangan antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Hal ini dianalogikan dengan warga negara yang mempunyai pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), diwajibkan membayar pajak.

Fungsi utama toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi antara lain:

- a. mencegah konflik yang ditimbulkan oleh kecemburuan sosial dari komunitas yang tidak mampu terhadap komunitas yang mampu;
- b. menciptakan kehidupan yang harmonis antara sesama warga negara, baik komunitas yang mampu maupun yang tidak mampu.

Nilai toleransi yang bertujuan untuk mencegah konflik dan menciptakan kehidupan yang harmonis pada hakikatnya merupakan wujud kesadaran sosial. Seseorang yang menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak telah mewujudkan kesadaran sosial tersebut dalam ranah publik sehingga dapat meredam sikap-sikap egosentris.

### 3. Nilai Kedermawanan

Kedermawanan adalah suatu sikap suka berbagi antara yang mampu kepada yang tidak mampu, dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan yang diperolehnya kepada pihak lain, antara lain dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan untuk pembayaran pajak. Negara dalam hal ini berperan sebagai mediator antara komunitas yang mampu dengan yang tidak mampu.

Fungsi utama kedermawanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain:

- a. mengungkapkan kemurahan hati antar sesama warga negara, sehingga melahirkan kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan ketenteraman dan kebahagiaan;
- b. menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena komunitas yang tidak mampu merasa diperhatikan sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal dan anarkis.

#### 4. Nilai Kerendahhatian

Kerendahhatian adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri untuk tidak bergaya hidup mewah yang dapat memancing kecemburuan sosial dalam kehidupan bersama.

Fungsi utama kerendahhatian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain:

- a. melahirkan suasana kedamaian dalam kehidupan bersama, karena pihak yang mampu tidak memamerkan kekayaannya secara berlebihan kepada lingkungan sekitarnya;
- b. menciptakan perasaan simpati dan empati dari kedua belah pihak dalam bentuk hubungan yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan.

#### 5. Nilai Keikhlasan

Keikhlasan adalah suatu perasaan rela untuk berbagi kepada pihak lain tanpa mengharapkan balasan dari pihak yang diberi. Artinya, seseorang dikatakan ikhlas ketika ia membantu pihak lain tanpa mengharapkan balasan, yang dalam terminologi Immanuel Kant disebut dengan “imperatif kategoris”, artinya melakukan perbuatan baik tanpa syarat, berbuat baik dengan tulus.

Fungsi utama keikhlasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain:

- a. melahirkan suasana kehidupan bermasyarakat yang alamiah, artinya pihak yang mampu ketika membantu pihak yang tidak mampu sebagai kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan tuntutan hari nurani;

- b. melahirkan ketenangan batin yang tulus bagi pihak yang mampu karena ia telah menunaikan kewajibannya.



### **AKTIVITAS**

*Mahasiswa diharap menemukan contoh-contoh konkrit dari nilai-nilai toleransi, kedermawanan, kerendahhatian, dan keikhlasan.*

## **5.3.2 Nilai-nilai dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai pentingnya sikap saling menghormati dalam hidup bersama, dan tidak menzalimi pihak lain. Komponen kecerdasan ideologis dalam sila kedua ini terletak pada kemampuan menjalin harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sikap persahabatan dan persaudaraan. Salah satu wujud sikap persahabatan dan persaudaraan ialah melalui suasana pergaulan yang menyenangkan, menghindarkan diri dari hal-hal yang memunculkan konflik, serta menjauhi perilaku yang dapat mengusik rasa keadilan dalam pergaulan antar warga.

### 1. Nilai Kemanusiaan Universal

Nilai kemanusiaan universal terwujud antara lain dalam bentuk ungkapan sebagai berikut:

- a. “Jika kamu ingin hidup untuk dirimu, maka kamu harus hidup untuk orang lain” (*alteri vivas oportet, si vis tibi vivere*).

Ungkapan ini mengandung makna bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, karena ia membutuhkan kehadiran orang lain. Fungsi utama nilai hidup untuk sesama adalah kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Artinya, sebagai makhluk individu manusia dapat melakukan sesuatu secara mandiri, namun dalam waktu yang bersamaan manusia membutuhkan orang lain untuk mendukung segala aktivitasnya.

- b. “Kepada semua orang kasih sayang itu harus sama” (*Amor omnibus idem*).



Ungkapan ini mengandung makna bahwa tidak boleh ada perbedaan antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, karena pada hakikatnya semua orang itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

## 2. Nilai Keadilan

Dalam nilai keadilan terdapat 3 (tiga) tolok ukur, antara lain:

- a. nilai kesetiakawanan, artinya orang yang mampu harus memiliki sikap solidaritas terhadap orang yang tidak mampu;
- b. nilai skandal sosial, artinya kalau sampai ada orang yang kaya tidak mau berbagi dengan orang yang miskin, maka hal ini merupakan perbuatan yang menurunkan dan merendahkan martabat orang kaya tersebut;
- c. kemiskinan itu sifatnya tidak alamiah, artinya setiap manusia dapat memperjuangkan haknya untuk hidup secara layak dan bermartabat.

## 3. Nilai Keadaban

Nilai keadaban mengacu kepada kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, dan akhlak.



### **AKTIVITAS**

*Mahasiswa diharapkan untuk menelusuri, menemukan dan mendiskusikan nilai-nilai kemanusiaan universal, keadilan, dan keadaban dalam kehidupan bermasyarakat.*

### **5.3.3 Nilai-Nilai dalam Sila Persatuan Indonesia**

Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai solidaritas, senasib sepenanggungan, dan rasa cinta tanah air. Berikut akan dikemukakan secara singkat makna nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga.

### 1. Rasa memiliki

Rasa memiliki adalah kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa aspek yang terkandung dalam rasa memiliki, antara lain:

- a. kesadaran atas hak sebagai warga negara;
- b. kesadaran atas kewajiban sebagai warga negara.

### 2. Rasa Mencintai Tanah Air

Daoed Joesoef (1987) mengatakan bahwa rasa mencintai tanah air ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. cinta tanah air dalam arti riil, yaitu rasa cinta terhadap negara dalam arti yang fisik, misalnya mencintai tanah kelahiran;
- b. cinta tanah air dalam arti formal, yaitu kesadaran atas hak dan kewajiban dalam konteks hukum, misalnya ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kewajiban kenegaraan melalui pembayaran pajak sebagai salah satu wujud bela negara secara nonfisik;
- c. cinta tanah air secara mental, yaitu seperangkat nilai-nilai ideologis yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 3. Nasionalisme

Nasionalisme sebagai rasa syukur, terdiri dari dua aspek, yaitu:

#### a. Negatif Defensif

Nasionalisme sebagai rasa syukur yang bersifat negatif defensif adalah kemampuan setiap warga negara untuk melawan musuh-musuh negara dan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap negara, contohnya melawan korupsi, melawan *free rider* (menikmati hasil pembangunan tanpa ikut berkontribusi), dan lain-lain.

#### b. Positif Progresif

Nasionalisme sebagai rasa syukur yang bersifat positif progresif adalah kemampuan setiap warga negara untuk mengolah potensi

dan sumber daya yang dimiliki untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa (temukan dalam buku Yudi Latif (2011), yang berjudul “Negara Paripurna”). Sebagai contoh adalah kontribusi warga negara dalam membayar pajak sehingga negara memiliki sumber daya yang cukup menciptakan kemakmuran dan kejayaan bangsa.

### **5.3.4 Nilai-nilai dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan kesediaan untuk menerima pendapat orang lain dan menerima keputusan bersama yang telah disepakati. Nilai-nilai dalam sila keempat diwujudkan dalam bentuk, antara lain:

1. mempertemukan pendirian pribadi dengan orang lain dalam suasana dialogis ialah sikap jiwa filosofis untuk menemukan harmoni antara pendapat pribadi dengan kebutuhan orang lain. Sebagai contoh sikap mengalah atau diam untuk menghindari konflik;
2. menciptakan suasana dialogis dalam komunikasi artinya kemampuan untuk memadukan pendapat pribadi dengan pandangan orang lain, sehingga melahirkan rasa kebersamaan;
3. semangat musyawarah untuk mencapai mufakat adalah mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

### **5.3.5 Nilai-nilai dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai keadilan yang berhubungan dengan kesejahteraan bersama. Dalam lingkup nasional, realisasi keadilan sosial ini diwujudkan dalam 3 (tiga) segi (keadilan segitiga), yaitu:

1. keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan terhadap warganya dengan

cara membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi haknya;

2. keadilan bertaat (legal), yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Jadi, dalam pengertian keadilan legal ini, warga negara merupakan pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya;
3. keadilan komutatif, yaitu keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan perkataan lain hubungan keadilan antara warga negara.

Selain itu, secara kejiwaan, cita-cita keadilan tersebut juga meliputi seluruh unsur manusia dan bersifat monopluralis. Sudah menjadi hakikat mutlak manusia untuk memenuhi kepentingan hidupnya, baik ketubuhan maupun kejiwaan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Semua hal tersebut termasuk dalam realisasi hubungan kemanusiaan yang utuh, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

#### **5.4 Mendeskripsikan Pentingnya Perwujudan Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kesadaran Pajak**

Krisis ideologis yang menyerang kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini membuktikan perlunya pembenahan dalam penanaman nilai-nilai ideologis pada anak bangsa. Kecerdasan ideologis diperlukan untuk memperluas cakrawala pemikiran dan pemahaman masyarakat tentang berbagai fenomena kehidupan yang melanda bangsa Indonesia. Beberapa hal yang diperlukan untuk memperkuat kecerdasan ideologis pada warga negara.

*Pertama*, penanaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara perlu dilakukan sedini mungkin pada anak didik, sesuai dengan kapasitasnya. Namun, harus diimbangi dengan keteladanan dalam bentuk nyata di bidang hukum, ekonomi, dan politik.

*Kedua*, penanaman nilai-nilai toleransi perlu dikembangkan pada area yang lebih luas untuk mengantisipasi semangat fanatisme daerah, kelompok, bahkan agama yang semakin memprihatinkan. Aturan tegas diperlukan

untuk menindak perilaku dan sikap intoleransi yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

*Ketiga*, norma kolektif perlu diinterpretasikan sesuai dengan semangat perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar generasi muda tidak menganggap nilai-nilai lama itu hanya merupakan bentuk pengulangan yang menghambat kemajuan sehingga nilai modernitas diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai yang sebelumnya sudah ada.

*Keempat*, nilai-nilai ideal sebagai tuntunan perlu ditanamkan secara optimal dalam pendidikan formal, informal, dan non-formal melalui strategi dan metode pengajaran yang tepat sesuai dengan problem aktual yang berkembang di masyarakat.

*Kelima*, komponen nilai kecerdasan ideologis yang bersumber dari Pancasila dapat dirinci sebagai berikut:

1. kemampuan menghadirkan Tuhan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui budi pekerti yang luhur dan saling menghormati (toleransi) antar umat beragama;
2. kemampuan menghargai perbedaan dan pengendalian diri dalam ruang publik melalui komunikasi dan dialog bersandar atas moralitas kemanusiaan universal;
3. kemampuan memprioritaskan kepentingan bangsa dan memiliki semangat pengorbanan yang terbina dari dalam diri setiap warga negara dengan cara menyelaraskan antara kepentingan politik dan kepentingan bangsa disertai dengan kemampuan memahami simbol-simbol negara sebagai konsensus hidup bersama;
4. kemampuan untuk berkomunikasi dengan semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan;
5. kemampuan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri dan menemukan keseimbangan antara nilai ideal yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan nilai kenyataan dalam kehidupan praktis.

## 5.5 Rangkuman

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan petunjuk arah dalam membangun bangsa dalam segala aspek kehidupan. Pancasila yang berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, apabila ditanamkan kepada peserta didik sejak dini, akan memberikan kesadaran kepada mereka bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Salah hak dan kewajiban warga negara itu adalah membayar pajak bagi yang mampu.

Kepatuhan membayar pajak bagi warga negara yang mampu merupakan wujud dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam membayar pajak, ketika menunaikan kewajibannya tersebut, dengan sendirinya telah mengamalkan *silu Ketuhanan Yang Maha Esa*, berupa rasa syukur atas kelebihan nikmat rejeki yang diperolehnya sebagai karunia dari Tuhan Maha Pemberi Rejeki. Pengamalan silu *Kemanusiaan yang adil dan beradab* bagi wajib pajak berupa wujud toleransi antara warga yang mampu kepada yang tidak mampu. Pengamalan silu *Persatuan Indonesia* berupa rasa kebersamaan atau solidaritas antar warga negara. Pengamalan silu *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan* merupakan perwujudan sikap bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengamalan silu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* merupakan perwujudan keadilan legalis, yaitu ketaatan warga negara dalam melaksanakan hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan hukum membayar pajak bagi yang mampu.

### 5.5. Proyek Belajar Sadar Pajak

Silu kelima bermakna bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Silu Keadilan sosial adalah tujuan dari empat silu yang mendahuluinya, serta merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam

bernegara, yang perwujudannya dilaksanakan dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Bagaimana cara negara, baik dari sisi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, agar dapat menggunakan instrumen pajak (tarif, PTKP, Objek dan Subjek Pajak) dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.